

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia melakukan pengesahan terkait komitmen pelaksanaan *ASEAN Economic Community Blue Print* (Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN) melalui Intruksi Presiden (Inpres) No 11 Tahun 2011.<sup>1</sup> Inpres tersebut menjelaskan mengenai kesepakatan pemerintah untuk melaksanakan komitmennya terkait AEC (*ASEAN Economic Community*), hal ini berarti pemerintah Indonesia telah sepakat dengan ASEAN untuk melaksanakan seluruh kesepakatan yang ada dalam AEC. Indonesia juga mengeluarkan beberapa peraturan baik undang-undang maupun Keputusan Presiden/Keppres sebagai bentuk reaksi atau bahkan strategi pemerintah untuk bisa menghadapi *ASEAN Economic Community*. Aturan-aturan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia guna menghadapi *ASEAN Economic Community* adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara);
2. Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009
3. Inpres Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA
4. Keppres Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN.
5. Keppres Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations*

---

<sup>1</sup><https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKewiFjvbDIO3MAhXFP48KHVYQAfoQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fpusatdata%2Fdownloadfile%2F4df9a8d3ba7a5%2Fparent%2F4df9a8a5c2e3c&usg=AFQjCNE-FofkaNgBUiNcb5V9fIoM1p-Hjg&sig2=s9jBNBgL8RVDQWUwU5hHBQ&bvm=bv.122448493,d.c2l> diakses pada Minggu, 22 Mei 2016

6. Perpres Nomor 10 tahun 2014 Tentang Pengesahan Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods (Protokol untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi ASEAN Tertentu Terkait Perdagangan Barang)

Awal mula Konsep *ASEAN Economic Community* disepakati pada acara KTT ASEAN Bali Concord II pada tahun 2003. Dimana dalam *ASEAN Community* tersebut disepakati ada tiga pilar yakni *ASEAN Security Community – ASC*, *ASEAN Economic Community- AEC* dan *ASEAN Socio-Cultural Community- ASCC*. pembahasan mengenai *ASEAN Community* sebenarnya sudah tertuang dalam ASEAN Vision 2020 di Kuala Lumpur pada Desember 1997.<sup>2</sup>

Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, dengan maksud untuk tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu AEC memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.<sup>3</sup>

*ASEAN Economic Community* sejatinya akan dilaksanakan pada tahun 2020 menurut hasil pertemuan di Kuala Lumpur pada tahun 1997 dan Bali Concord II tahun 2003. Namun kesepakatan tersebut dipercepat pada tahun 2015 (pemberlakuan AEC akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015) hasil dari pertemuan KTT ke-12 di Cebu Filipina tanggal 12-13 Januari tahun 2007.<sup>4</sup> Beberapa bulan kemudian Indonesia dan negara seluruh negara anggota ASEAN meratifikasi *ASEAN Economic Community*

---

<sup>2</sup> LIPI. Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008.Hlm

<sup>3</sup> <http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=19&l=id> diakses pada tanggal 8 desember 2015 pukul 16.37 WIB

<sup>4</sup> LIPI. Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008.Hlm. 6

*Blue Print* pada KTT ASEAN ke 13 di Singapura pada 20 november 2007.<sup>5</sup> kemudian pada KTT 15 ASEAN + 3 (Jepang, China, Korsel) di Phnom Penh Kamboja pada 2012, kesepakatan *ASEAN Economic Community* (ada sedikit penundaan) akan diberlakukan pada tanggal 31 desember 2015.<sup>6</sup>

*ASEAN Economic Community Blue Print* berisi tentang agenda besar ASEAN dalam melakukan liberalisasi pasar ASEAN , guna menciptakan kawasan ekonomi yang terintegrasi di kawasan ASEAN. Sehingga diharapkan akan meningkatkan daya saing ekonomi di antara negara anggota ASEAN. Penciptaan pasar tunggal ASEAN menjadi suatu hal yang seolah harus diwujudkan sebagai bentuk komitmen ASEAN untuk meningkatkan taraf perekonomian negara kawasan. Integrasi ekonomi kawasan diharapkan mampu menghilangkan hambatan-hambatan yang selama ini menjadi kendala dalam proses pengembangan ekonomi kawasan. Tidak ada lagi pajak import yang akan masuk ke negara, karena masuk dan keluarnya barang dan jasa di kawasan ASEAN menjadi nol tarif.

Kebijakan Indonesia tersebut menuai banyak tanggapan dari praktisi ekonomi, pengamat dan akademisi. Edy Burmansyah memberi komentar bahwa dengan masuknya Indonesia dalam AEC maka sesungguhnya Indonesia telah kehilangan kedaulatannya sebagai sebuah bangsa. Indonesia tidak dapat lagi menyusun perencanaan pembangunan ekonominya secara mandiri, segala kebijakan ekonomi Indonesia harus merujuk pada rezim perdagangan bebas ASEAN salah satunya yakni *ASEAN Economic Community*.<sup>7</sup> Kemudian Didik J. Rachbini anggota DPRI (2004-2009) menyatakan bahwa bidang perdagangan dan industri meragukan keuntungan pasar tunggal bagi ekonomi Indonesia. lebih baik memaksimalkan kebijakan

---

<sup>5</sup> Edy Burmansyah. *Rezim Baru ASEAN : Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Pustaka sempu. 2014. Hlm. 28

<sup>6</sup> [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/119496-%5B\\_Konten\\_%5D-Pemberlakuan-MI0001.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/119496-%5B_Konten_%5D-Pemberlakuan-MI0001.pdf) diakses pada tanggal 8 desember 2015 pukul 17.17 Wib.

<sup>7</sup> Op.cit Edy Burmansyah. *Rezim Baru ASEAN : Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Pustaka sempu. 2014. Hlm. 27-29.

perdagangan Indonesia yang sudah sangat terbuka saat ini daripada membuka pintu lebar yang malah merugikan Indonesia.<sup>8</sup>

Pendapat-pendapat tersebut bukan tanpa alasan, ada banyak sektor yang belum disiapkan secara matang oleh Indonesia. Baik iklim investasi, aturan penanaman modal, birokrasi yang modern (tidak berbelit), kepastian hukum, kontinuitas program pemerintah antar periode dan yang pasti yakni kesiapan dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Ada beberapa pendapat yang menyatakan ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi AEC. Dr. Ganewati Wuryandari (peneliti LIPI) menyatakan bahwa Indonesia secara umum memang bisa dikatakan belum siap untuk menghadapi AEC. Persoalan rumitnya proses birokrasi untuk investasi membuat dana segar yang masuk ke Indonesia lebih lambat daripada negara tetangga. Tekanan eksternal berupa sistem politik dan ekonomi Internasional membuat Indonesia harus membuka diri dan ikut dalam AEC. Kalau tidak Indonesia akan diasingkan dalam pergaulan internasional.<sup>9</sup>

Di sisi infrastruktur, misalnya, arus lalu lintas barang di dalam pulau maupun antarpulau tidak lancar karena kualitas jalan yang rendah, pelabuhan yang tidak memadai, dan sarana angkut antarpulau yang sering “batuk-batuk”. Ini membuat biaya logistik meningkat dan melemahkan daya saing industri lokal.<sup>10</sup> Kualitas infrastruktur Indonesia hingga saat ini masih kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Survei *World Economic Forum Report 2010* menunjukkan, kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat ke-96 dari 133 negara. Malaysia dan Thailand berada di posisi ke-27 dan ke-41. Dan bila dibandingkan dengan Singapura, Indonesia lebih kelihatan jebloknya.<sup>11</sup> Hal juga ini diperkuat dengan berbagai masalah yang belum ditangani pemerintah dengan baik. Disi

---

<sup>8</sup> Op.cit LIPI. Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 2008. Hlm. 130

<sup>9</sup> Ganewati Wuryandari. Politik Luar Negeri Indonesia : Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional. LIPI. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011. Hlm. 178

<sup>10</sup> <http://www.indonesiamedia.com/masyarakat-ekonomi-asean-berkah-atau-musibah/> diakses pada tanggal 8 desember 2015 pukul 17.02 WIB

<sup>11</sup> Ibid lihat <http://www.indonesiamedia.com/masyarakat-ekonomi-asean-berkah-atau-musibah/> diakses pada tanggal 8 desember 2015 pukul 17.02 WIB

lain Bunga kredit perbankan di Indonesia juga sangat memberatkan dunia usaha. “Bunga bank di sini masih di kisaran 12%-15%, sangat mahal bila dibandingkan dengan negara tetangga yang 5%-6%,” kata Putri K. Wardani, Ketua Umum Perusahaan Kosmetik dan Gabungan Industri Jamu. Bunga perbankan yang selangit itu, antara lain, disebabkan masih rendahnya tingkat efisiensi perbankan di Indonesia. Dari sisi energi, menurut Putri, pasokannya juga tidak lancar dan mahal.<sup>12</sup>

Indonesia secara langsung maupun tidak terlihat antusias dalam aktifitas politik luar negerinya terhadap ASEAN khususnya terkait kesepakatan *ASEAN Economic Community- AEC*. Antusias menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti *bersemangat* atau *bergairah*.<sup>13</sup> Hal ini bisa dilihat dengan selalu hadirnya Indonesia pada proses pembentukan *ASEAN Economic Community*. Tidak hanya hadir Indonesia juga meratifikasi hasil-hasil pertemuan tersebut.

Menurut peneliti, kebijakan Indonesia meratifikasi *ASEAN Economic Community Blue Print* sebagai bentuk komitmennya terhadap kesepakatan AEC dirasa tidak banyak menguntungkan Indonesia. *ASEAN Economic Community* seolah dijadikan momentum bagi Indonesia untuk bisa memulihkan kondisi ekonominya. Namun ada beberapa tanggapan pesimis terkait kebijakan Indonesia untuk ikut ambil bagian di AEC. Menurut

Peneliti melihat bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia yang ikut dalam *ASEAN Economic Community* tidak hanya murni dari Indonesia (kepentingan nasional), tapi lebih dikarenakan adanya suatu tekanan internasional yang sengaja memaksa Indonesia untuk ikut dalam AEC. Menurut Ganewati Wuryandari kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk bergabung di AEC lebih karena ada tekanan faktor Internasional berupa sistem ekonomi global yang merembes ke ASEAN yang menghasilkan *ASEAN*

---

<sup>12</sup> Ibid lihat <http://www.indonesiamedia.com/masyarakat-ekonomi-asean-berkah-atau-musibah/> diakses pada tanggal 8 desember 2015 pukul 17.02 WIB

<sup>13</sup> <http://kbbi.web.id/antusias> di akses pada tanggal 28 november 2015 pukul 21.49

*Economic Community*. Sementara elit politik dan ekonomi nasional tidak mampu menghadapi tekanan tersebut.<sup>14</sup>

Dengan penjelasan diatas maka peneliti menemukan sebuah abivalensi kebijakan politik luar negeri yang dilakukan Indonesia. Di satu sisi Indonesia antusias dalam pembentukan *ASEAN Economic Community*, di sisi yang lain Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapi hal tersebut. Ini yang kemudian akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti dengan menggunakan berbagai macam data baik (primer dan sekunder) dan perspektif baik teori, konsep maupun paradigma. Sehingga dapat dihasilkan sebuah penelitian yang analitik dan ilmiah.

## **B. Rumusan Masalah**

Apa saja faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam meratifikasi *ASEAN Economic Community Blue Print* ?

## **C. Tujuan Riset**

1. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk menyepakati pembentukan *ASEAN Economic Community*
2. Untuk mengetahui seberapa jauh kepentingan Indonesia pada *ASEAN Economic Community*
3. Untuk mengetahui seberapa siap Indonesia menghadapi *ASEAN Community/ ASEAN Economic Community*

## **D. Kontribusi Riset**

Hasil penelitian/riset ini akan punya kontribusi dalam dua hal yakni

1. Secara Akademis

---

<sup>14</sup> Op.cit. Ganewati Wuryandari. *Politik Luar Negeri Indonesia : Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. LIPI. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011. Hlm. 92-94

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan akademis untuk para penstudi hubungan internasional yang *concern* pada kajian politik luar negeri khususnya Indonesia. Kajian politik luar negeri bukan persoalan mudah dan *simple*. Banyak factor yang mempengaruhi kebijakan tersebut, apakah diwilayah politik domestic, politik internasional, sistem birokrasi, actor dan banyak hal lainnya. secara akademis hasil penelitian ini nantinya juga kan bermanfaat bagi akademisi yang juga concern pada kajian regionalime khususnya ASEAN.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan rujukan dan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya khususnya di ASEAN. Sehingga pemerintah nantinya bisa dengan bijak untuk bisa merumuskan politik luar negerinya yang berdasar kepentingan nasional, konstitusi dan menjadi politik luar negeri sebagai instrument penting guna mencapai kesejahteraan. Tidak hanya kemudian indonesia terlena dengan masa lalu sebagai negara yang kuat tapi juga realistis dengan kondisi yang ada sekarang.

## E. Orginalitas Riset

Ada beberapa tesis atau penelitian yang membahas mengenai kebijakan Indonesia dalam *ASEAN Community*. Mulai dari berbentuk skripsi, tesis, disertasi, buku maupun jurnal, dengan pembahasan yang hampir sama dengan peneliti lakukan. Namun yang banyak ditemui yakni peneliti-peneliti tersebut menggunakan bidang kelimuannya untuk melakukan analisa, semisal dari perspektif hukum, kemanan, ekonomi maupun politik. Misalkan salah satu jurnal hukum dari Universitas Atma Jaya dengan judul *Tantangan Dan Peluang Indonesia Dalam Pembentukan ASEAN Community 2015 Di Bidang Keamanan*.<sup>15</sup> Dengan tema *ASEAN Community* yang hampir sama dengan yang diteliti oleh peneliti, namun punya perbedaan dari segi pembahasan. Peneliti membahas

---

<sup>15</sup> Pratama, Y. W. (2013). Tantangan Dan Peluang Indonesia Dalam Pembentukan Asean Community 2015 Di Bidang Keamanan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-15. <http://e-journal.uajy.ac.id/5034/1/JURNAL%20YOSAFAT%20WIRA%20PRATAMA.pdf> Diakses pada tanggal 25 november 2015 pukul 08.51

*ASEAN Community* dalam bingkai *ASEAN Economic Community* AEC. Sedangkan dalam peneliti tersebut dia (peneliti) focus pada bidang keamanan dalam *ASEAN Community*. Perbedaan fokus kajian ini menjadi suatu yang harus diketahui diawal, supaya apabila ditemukan suatu persamaan, maka peneliti bisa menyajikan sebuah data dan refrensi yang berbeda. Perbedaan subjek dan objel pada penelitian pun punya pengaruh besar, sehingga hal ini menjadikan peneliti mampu menunjukkan originalitasnya.

Adapun beberapa persamaan yang terjadi misalkan pada sub-bab, dimana peneliti juga melakukan pembahasan yang hampir serupa namun tidak sama. Ini adalah sebuah hal yang maklum ditemui dalam karya akdemik, namun peneliti juga mampu mempertanggung jawabkan apa yang dituliskanya. Sehingga tidak ada muncul bahasa plagiarism atau copy paste, yang dalam beberapa waktu dekat ini santer menjadi isu di dunia akademik. Tentunya peneliti juga punya data, ukuran dan refrensi yang berbeda.

Kemudian ada dua judul penelitian lain yakni . Pertama, *Peran Dan Tantangan ASEAN Economic Community (AEC) Dalam Mewujudkan Integrasi Ekonomi Kawasan Di Asia Tenggara*.<sup>16</sup> Dalam penelitian tersebut memang hampir serupa dengan yang dibahas oleh peneliti, namun Objek penelitiannya adalah ASEAN bukan Indonesia. seperti yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya yakni *Dari Politik Pembangunan ke Regionalisme ASEAN: Melacak Genealogi Politik Luar Negeri Indonesia Kontemporer*, karya Umar.<sup>17</sup> Dalam tulisan tersebut memang ada unsur study politik luar negerinya, namun lebih pada pendekatan kebutuhan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN. Tetapi tidak fokus pada *ASEAN Community/ ASEAN Economic Commnity*.

---

<sup>16</sup> Afandi, M. M. (2011). Peran Dan Tantangan ASEAN Economic Community (AEC) Dalam Mewujudkan Integrasi Ekonomi Kawasan Di Asia Tenggara. *SPEKTRUM*, 8(1).  
<http://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/482/604> Diakses pada tanggal 6 november 2015 pukul 08.23

<sup>17</sup> Umar, A. R. M. *Dari Politik Pembangunan ke Regionalisme ASEAN: Melacak Genealogi Politik Luar Negeri Indonesia Kontemporer*.  
[http://www.kemlu.go.id/pusdiklat/Documents/01%20Politik/Dari%20Politik%20Pembangunan%20ke%20Regionalisme%20ASEAN%20%20Melacak%20Genealogi%20Polugri%20Kontemporer%20\(Politik\).pdf](http://www.kemlu.go.id/pusdiklat/Documents/01%20Politik/Dari%20Politik%20Pembangunan%20ke%20Regionalisme%20ASEAN%20%20Melacak%20Genealogi%20Polugri%20Kontemporer%20(Politik).pdf)  
Diakses pada tanggal 6 november 2015 pukul 08.28

Maka peneliti menyakini bahwa originalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah original. Adapun penyajian data, teori, statement dan sebagainya (data sekunder), Maka peneliti berkewajiban mengutip sebagai bentuk pertanggung jawaban akademis dan etika dalam penulisan. Dengan penjelasan diatas maka peneliti menyakini bahwa belum ada penelitian yang serupa dengan apa yang diteliti oleh peneliti saat ini. adapun yang sejenis tapi punya perbedaan mendasar misal fokus kajian, objek penelitian, pendekatan teori dan konsep, dan data-data yang disajikan.

## F. Study Pustaka

Study Pustaka adalah suatu bentuk kajian yang dilakukan dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk membingkai suatu kerangka teoritik. Study pustaka ini digunakan sebagai bentuk telaah akademis mengenai posisi peneliti dalam membentuk opini atau argumentasi tentang suatu penelitian, sehingga ada suatu bentuk afirmasi dari ahli atau peneliti sebelumnya tentang tema yang hampir serupa dengan yang dilakukan oleh peneliti.

Peneliti menggunakan sebuah tabel untuk menterjemahkan hasil study pustakanya untuk memudahkan identifikasi pendapat-pendapat tersebut. Adapun beberapa ahli yang dikutip oleh peneliti antara lain yakni pakar politik luar negeri, pengaman ekonomi, pengamat ekonomi internasional, akademisi, aktifist INGO dan beberapa praktisi ekonomi. Berikut data tabel hasil dari study pustaka yang dilakukan oleh peneliti.

**Tabel 1.1**

**Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)<sup>18</sup>**

	<b>Uraian Singkat</b>	<b>Kesimpulan</b>
<b>Helene S. Nesadurai</b>	Negera berkembang berpeluang dalam dalam agenda globalisasi seperti FTA. Tinggal bagaimana kesiapan dalam negeri mereka	Siap atau tidak globalisasi ekonomi akan memaksa negara berkembang untuk ikut andil didalamnya
<b>Erani Yustika</b>	Untuk kondisi sekarang agaknya Indonesia belum siap untuk bertarung di AEC. Kesepakatan tersebut akan banyak merugikan Indsutri kecil di Indonesia.	Indonesia belum siap menghadapi AEC. Harus banyak persiapan yang dilakukan
<b>Ganewati</b>	Persoalan kepastian hukum terkait investasi dan	Ketika persoalan birokrasi

<sup>18</sup> Diolah dari berbagai macam sumber

<b>Wuryandari</b>	rumitnya birokrasi Indonesia, membuat Indonesia harusnya berfikir ulang untuk bertarung di AEC. Sistem politik dan ekonomi internasional menyeret Indonesia untuk ikut dalam AEC. Karena faktor tersebut sangat signifikan mempengaruhi kebijakan polugri Indonesia.	Indonesia sudah diperbaiki maka Indonesia masih punya peluang. Begitupun sebaliknya
<b>Edy Burmansyah</b>	Kesepakatan FTA hanya menguntungkan negara maju saja, dan tidak menguntungkan untuk negara berkembang. Indonesia masih belum mampu menghadapi AEC.	Hanya negara yang siap secara infrastuktur dan supruktur yang bisa menghadapi AEC. Indonesia belum siap untuk itu
<b>Bambang Cipto</b>	Indonesai sebagai negara besar harus mampu bertarung di kawasan. AEC masih membuka lebar kesempatan tersebut. hanya saja indonesia seakan belum siap. Banyak kendala salah satunya yakni infrastuktur dan birokrasi.	Indonesia masih harus menyiapkan banyak hal. Infrakstruktur menjadi problem utama
<b>Dodi Mantra</b>	Integrasi ekonomi (pasar tunggal) AEC harusnya membawa banyak peluang bagi Indonesia. Namun melihat kondisi factual ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, dan daya saing yang lemah/rendah. maka harusnya Indonesia memperkuat ekonomi dalam negeri sebelum masuk AEC.	Kondisi ekonomi Indonesia hari ini, secara faktual belum siap menhadapi AEC.

Dari uraian mengenai literatur review diatas, maka peneliti lebih sepakat dengan pendapat dari ganewati wuryandari mengenai ketidaksiapan Indonesia menghadapi *ASEAN Community/ ASEAN Economic Community* yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dan persoalan birokrasi yang sering menghambat investasi. Kemudian adanya sebuah tekanan internasional yang secara sengaja atau tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan Indonesia meratifikasi kesepakatan *ASEAN Economic Community*.

Adapun pendapat dari para ahli yang disebutkan diatas akan dijadikan sebagai bahan referensi akademis yang tentunya masih sangat relevan untuk digunakan dalam pengembangan tesis ini. Sehingga semua pendapat tersebut pada akhirnya akan tetapa digunakan sebagai bahan afirmasi atas tesis yang akan diteliti oleh peneliti.

## **G. Kerangka Teoritik**

### **1. Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri adalah salah satu instrument penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Tidak hanya persoalan dalam negeri saja yang

menjadi tugas utama pemerintah, tapi persoalan hubungan dengan negara lain dan persoalan kepentingan nasional yang akan dicapainya. Menurut Chris Brown politik luar negeri adalah suatu usaha dari sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasional dengan melakukan hubungan terhadap dunia luar.<sup>19</sup> apa yang disampaikan Brown terkait makna politik luar negeri sebenarnya cukup sederhana.

Menurut Marijke Breuning politik luar negeri adalah suatu aktifitas yang mendefinisikan politik dan interaksi sebuah negara dalam suatu lingkungan antar wilayah (negara).<sup>20</sup> kemudian menurut M. Sabir politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.<sup>21</sup> ada banyak pendapat mengenai istilah politik luar negeri. Menurut peneliti politik luar negeri tidak lepas dari kepentingan nasional dan interaksi dengan dunia luar. Maka secara jelas setiap apa yang dilakukan oleh suatu negara yang itu disebut sebagai politik luar negeri, tentunya tidak terlepas dari sebuah kepentingan nasional. Apapun strategi yang digunakan maka jelas sekali semua berdasar pada kepentingan nasional. bisa dikatakan politik luar negeri sangat *self deterrence*.

### Skema 1.1

#### **Model Proses Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Menurut William D. Coplin.<sup>22</sup>**

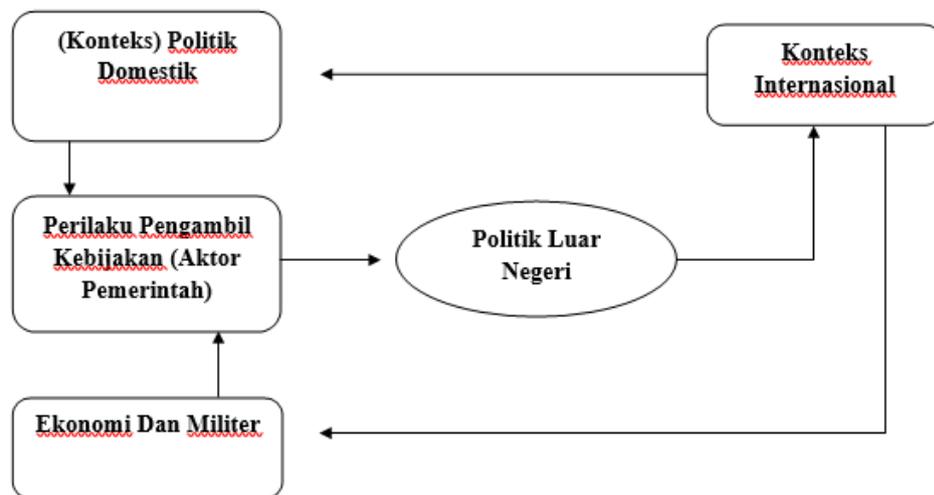
---

<sup>19</sup> Chris brown. Understanding international relation, 2<sup>nd</sup> Edition. London. Palgrave. 2001. Hlm. 68-86.

<sup>20</sup> Marijke Breuning. Foreign policy analysis : A Comparative introductions. New York. Palgrave Macmillan. 2007 hlm. 5

<sup>21</sup> H.M. Sabir. Politik Bebas Aktif : Tantangan dan Kesempatan. jakarta Inti Dayu Press, , 1987. Hlm. 10

<sup>22</sup> William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis, Bandung. Penerbit Sinar Baru. Edisi ke-2, 2003, hlm. 30



Peneliti mencoba memakai konsep politik luar negeri dari persepektif William D. Coplin dengan mengidentifikasi empat factor determinan yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri.<sup>23</sup> *Pertama*, adalah konteks internasional. Artinya politik internasional punya peranan penting dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. ada tiga elemen penting dalam konteks internasional yang menurut Coplin yang berpengaruh terhadap kebijakan politik luar negeri yakni geografis, ekonomis dan politik. *Kedua*, adalah perilaku dari para pengambil kebijakan. Hal ini punya pengaruh besar terhadap dicetuskannya kebijakan politik luar negeri suatu negara. lembaga pemerintah semisal eksekutif, kementerian dan lembaga negara disuatu pemerintahan punya pengaruh besar dalam kebijakan politik luar negeri. Persepsi, pengalaman, pengetahuan serta kepentingan individu-individu menjadi preferensi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

*Ketiga*, adalah kondisi ekonomi dan militer. Dua hal tersebut tentunya punya pengaruh dalam aksi kebijakan politik luar negeri suatu negara khususnya persoalan power. *Keempat* yakni konteks (kondisi) politik domestik. Situasi politik dalam negeri sangat memperngaruhi perumusan dan pelaksanaan politik

<sup>23</sup> Ganewati Wuryandari. *Politik Luar Negeri Indonesia : Di Tengah Pusaran Politik Domestic*. LIPI. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2008 . hlm. 17-18

luar negeri. Melalui persektif ini sistem pemerintahan, birokrasi punya peranan penting dalam perancangan mengkondisikan politik nasional suatu negara.

## 2. Globalisasi

Pada dekade terkahir mungkin ini kita jamak dengan istilah globalisasi. Suatu peristiwa dimana lalu lintas manusia, barang, jasa dan informasi menjadi cepat dan tidak terbatasi oleh territorial suatu negara. Globalisasi tidak hanya persoalan yang bersifat *intangible* tapi juga bersifat *tangible*. Maksudnya bahwa globalisasi tidak hanya membawa lalu lintas secara fisik (manusia, barang dan jasa) namun juga persoalan non-fisik misalkan (budaya dan ideologi).

Menurut Erani Yustika tidak ada konsep tunggal mengenai globalisasi. Dalam beberapa literatur belum disepakati pula kapan globalisasi itu muncul. Namun yang pasti gejala globalisasi ini menguap pada tahun 1990an, setelah runtuhnya negara Uni Soviet sebagai basis sosialisme dunia, sebagai tanda kemenangan kapitalisme global. Namun secara tidak langsung globalisasi memberikan pemahaman mengenai batas teritori negara yang semakin kabur adanya. Sehingga semua arus lalu lintas berupa barang dan jasa tidak mengenal batas wilayah tersebut.<sup>24</sup> dalam pernyataan tersebut peneliti melihat bahwa pasca berakhirnya perang dingin memberikan perubahan besar pada sistem politik dan ekonomi internasional.

Sedangkan menurut Helene S. Nesaduari yang diambil dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa globalisasi dibagi menjadi tiga bagian dengan penjelesan sebagai berikut. *Pertama*, globalisasi dalam perspektif struktur, dimana ada agent dalam sebuah struktur internasional yang memainkan sebuah peranan. Semisal actor pembuat kebijakan (pemerintah), pelaku usaha, organisasi internasional bahkan individu. Semua aspek tersebut mampu bermain dalam dunia internasional saat ini. *Kedua* menurut Higgot yakni globalisasi dalam perspektif multi-dimensional yang alamiah. Dimana ada suatu kejadian yang alamiah yang terjadi dalam proses globalisasi semisal factor ekonomi yang menimbulkan

---

<sup>24</sup> Erani Yustika. Ekonomi Politik : Kajian Teoritis dan Analisa Empiris. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.2011. hlm. 72-73

perdagangan bebas atau liberalisasi pasar. Dimana aktornya bukan hanya negara saja yang bermain, ini yang disebut Helene sebagai *ideational/cognitive* dalam globalisasi. *Ketiga* menurut Scholte dan Hughes yakni *feature of globalization*, adanya suatu peristiwa perpindahan aktifitas manusia dari negara satu ke negara lain tanpa dipersulit persoalan batas wilayah negara. ini yang disebut sebagai “*reconfiguration social space away from dan beyond notions of delineated territory*”.<sup>25</sup>

Batas teritori negara dalam sudut pandang globalisasi menjadi kabur adanya. Secara tidak langsung ini akan mempercepat hubungan banyak negara dalam satu kawasan maupun internasional. Jika kemudian globalisasi ini dijadikan momentum bagi banyak pihak khususnya Indonesia, maka didapat diambil banyak manfaat. Manfaat secara ekonomi adalah paling mungkin bisa dicapai, namun apabila tidak dibarengi dengan langkah yang tepat maka bisa jadi hasilnya kan berbalik arah. Globalisasi adalah suatu arus yang kemudian tidak dapat dibendung, hanya saja masih bisa diatasi dengan beberapa skema (sebut saja kebijakan) baik secara politik, ekonomi dan keamanan. Globalisasi punya dampak seperti dua mata pedang, saling-silang. bisa jadi bermanfaat bisa jadi pula sangat merugikan.

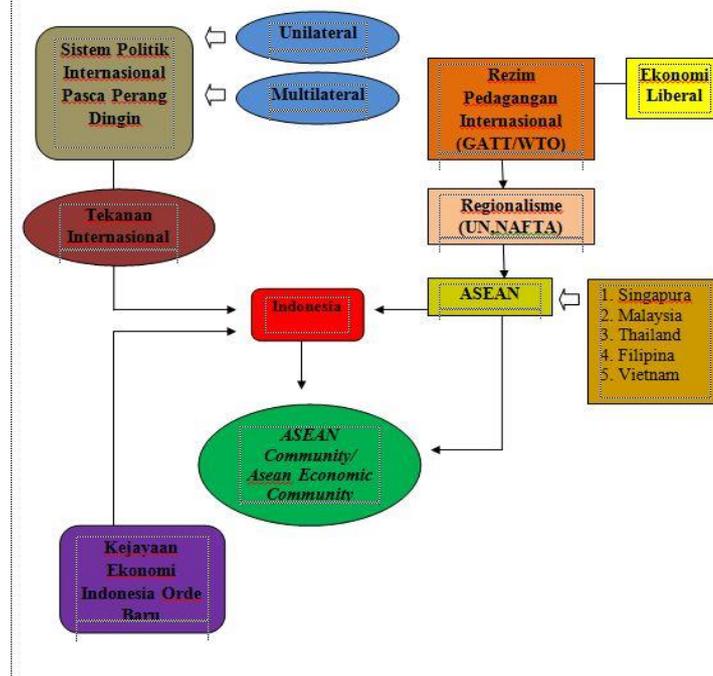
Menurut peneliti globalisasi adalah salah satu factor (eksternal) penting yang mempengaruhi terbentuknya *ASEAN community/ ASEAN Economic Community* yang sekarang digagas oleh ASEAN. Indonesia agaknya tidak mampu berbuat banyak dengan fenomena tersebut. secara tidak langsung Indonesia dipaksa mengikuti arus tersebut yang kemudian berujung pada kebijakan menyepakati AEC. Peneliti mencoba merangkai analisisnya dari penjelesan diatas dengan menggunakan sebuah skema sederhana. Ini adalah skema mengenai hal-hal yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam menyepakati AEC.

---

<sup>25</sup> Helene S. Nesadurai. *Globalization, Domestic Politics and Regionalism*. Routledge. New york. 2003. Hlm. 20.

Skema 1.2

Hal-hal Yang Mempengaruhi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada *ASEAN Community/ ASEAN Economic Community*.<sup>26</sup>



H. Hipotesa

Dari penjelasan diatas maka untuk sementara peneliti menyatakan bahwa mengapa Indonesia meratifikasi pembentukan *ASEAN Community* adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut : *Pertama*, Kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk meratifikasi *ASEAN Community* tentu belandaskan kepentingan nasional, namun peneliti melihat ada kecenderungan bahwa kebijakan tersebut lebih karena adanya tekanan dari (sistem politik) internasional dan dari regionalisme ASEAN (integrasi ekonomi kawasan). Dua faktor eksternal tersebut memberikan tekanan yang cukup signifikan pada Indonesia untuk meratifikasi kesepakatan tersebut.. *Kedua*, kebijakan Indonesia yang ikut ambil bagian dalam *ASEAN Economic Community* adalah bagian dari persoalan *prestige*. Indonesia adalah negara dengan luas wilayah terbesar dan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga pernah maju di bidang

<sup>26</sup> Diolah dari berbagai sumber

ekonomi pada masa Orde Baru. Menurut peneliti, persoalan *prestige* tersebut punya pengaruh besar terhadap Indonesia dalam kebijakannya meratifikasi kesepakatan *ASEAN Community* tersebut.

## **I. Methodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian eksplantif. Maksudnya bahwa peneliti menentukan suatu fenomena yang kemudian dianalisa dengan menggunakan teori, konsep maupun pendekatan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini juga digunakan sebagai bahan analisa atas apa yang terjadi dalam fenomena tersebut dan mengapa fenomena tersebut terjadi.

### **2. Obyek Penelitian**

Untuk memudahkan analisa yang kemudian berujung pada focus penelitian. Maka peneliti menentukan obyek penelitian dalam penelitian ini yakni politik luar negeri Indonesia. Indonesia sebagai obyek primer dalam penelitian yang dilakukan. Karena Indonesia sebagai actor yang juga terlibat dalam pembentukan *ASEAN Community*. Actor kemudian menjadi obyek penelitian. Sedangkan *ASEAN Community* adalah sebagai variable dependent yang kemudian mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia tersebut.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang berarti data utama didapatkan dari hasil wawancara dari ahli (Pengamat, Akademisi) atau pelaku kebijakan/praktisi (menteri, anggota dewan dan lain-lain). Sedangkan data sekunder di dapat dari data yang relevan semisal : jurnal, majalah, internet, buku, tugas akhir (S1, S2, maupun S3) dan beberapa data lainnya yang dianggap relevan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni study pustaka (*library research*). peneliti mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan kemudian melakukan analisa dengan menggunakan data-data tersebut. Penelitian ini merupakan

penelitian eksplanatif, dimana data yang diperoleh digunakan sebagai bahan analisa atas pembahasan yang akan diteliti. Maka penggunaan data yang sifatnya informatif atau sudah pada tahap analisis digunakan untuk membedah fenomena yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisa data kualitatif bertujuan untuk menjadikan data-data tersebut sebagai pijakan dalam menganalisa sebuah fenomena yang diteliti. Dimana data yang digunakan tidak hanya berupa angka nominal tapi juga merupakan hasil dari study literasi maupun wawancara yang sifatnya kualitatif.

#### 6. Batasan Penelitian

Untuk mempersempit pembahasan dan mereduksi pengembangan penelitian yang tidak maksimal. Maka batasan penelitian dalam penelitian ini yakni pada tahun 2004-2014. Atau pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengapa demikian, karena pada masa tersebutlah Indonesia terlihat begitu antusias untuk menyepakati pembentukan *ASEAN Community/ASEAN Economic Community*..

### **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab antara lain :

BAB I terdiri dari Latar Belakang, Tujuan Riset, Rumusan Masalah, Kontribusi Riset, Study Pustaka, Kerangka Teoritik, Hipotesa dan Metodologi Penelitian.

BAB II Politik Luar Negeri Indonesia di Asia Tenggara

BAB III Proses Ratifikasi Perjanjian *ASEAN Economic Community Blue Print*

BAB IV Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Indonesia Dalam Meratifikasi *ASEAN Economic Community Blue Print*

BAB V Kesimpulan, membahas mengenai hasil terakhir dari penjelasan dan ulasan dari seluruh bab secara komprehensif.